BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di era reformasi telah mengalami perubahan yang fundamental di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi di masa pelaksanaan yang secara luas, nyata dan bertanggung jawab yang dititik beratkan di daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan penyelenggaran otonomi daerah perlu dilaksanakan penataan kewenangan, kelembagaan, pegawai, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi sehingga implementasi otonomi daerah dapat dilaksananakan secara efektif dan efisien.

Sistem sentralisasi yang diterapkan di Indonesia sebelum diterapkannya otonomi daerah, menimbulkan pendapatan asli daerah (PAD) di setiap daerah sangat kecil karena dana tersebut harus terlebih dahulu diserahkan kepada pemerintah pusat. Sistem sentralisasi yang diterapkan menyebabkan aparatur pemerintah pusat kurang dapat mengelola sumber daya yang dimiliki kurang baik, sehingga banyak merugikan sebagai besar masyarakat Indonesia. Besarnya sumber daya Indonesia tidak diiringi oleh moral aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan negara. Banyak sekali aparatur pemerintahan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang hanya mementingkan diri sendiri.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional